

## OPTIMALISASI INVESTASI UNTUK NEGARA ANGGOTA APEC (KAJIAN EKONOMI & TANTANGAN DPMPTSP-DKI JAKARTA)

### INVESTMENT OPTIMIZATION FOR APEC MEMBER COUNTRIES (ECONOMIC STUDIES & CHALLENGE OF DPMPTSP-DKI JAKARTA)

**Budya Pryanto Putra & Aleknaek Martua Nababan**

<sup>1</sup>DPMPTSP – DKI Jakarta, Jl. Epicentrum Sel., 02/05, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

<sup>2</sup>Alumnus MPKP - Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya no 4, Jakarta Pusat, 10430

[budyapryanto@gmail.com](mailto:budyapryanto@gmail.com) & [aleknaeknababan@gmail.com](mailto:aleknaeknababan@gmail.com)

#### ABSTRAK

*Foreign Direct Investment (FDI) merupakan salah satu indikator perekonomian yang saat ini mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan keberadaan Foreign Direct Investment berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap kinerja perekonomian di dalam suatu negara. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peran indikator kemudahan berusaha khususnya starting a business dan dealing with construction permits yang digagas oleh World Bank dalam memengaruhi besarnya Foreign Direct Investment negara anggota APEC. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hubungan sebab akibat dengan analisis regresi linear berganda dengan metode penaksiran parameter GMM (Generalized Method of Moments). Hasil yang didapatkan dari analisis tersebut adalah starting a business memiliki peran yang cukup besar terhadap foreign direct investment di samping variabel kontrol ekonomi berupa GDP Riil, Angkatan Kerja, dan Human Development Index. Kesimpulan dari penelitian ini adalah starting a business dan Human Development Index memiliki peranan yang sangat vital bagi perkembangan investasi untuk negara kawasan Asia Pasifik.*

**Kata kunci :** *Foreign Direct Investment, Kemudahan Berusaha, APEC*

#### ABSTRACT

*Foreign Direct Investment (FDI) is one of the economic indicators that is currently getting special attention from the government. This is because the presence of Foreign Direct Investment has a direct and indirect influence on economic performance in a country. The purpose of this analysis is to find out how big the role of indicators of ease of doing business, especially the starting a business and dealing with construction permits, which was initiated by the World Bank in influencing Foreign Direct Investment on APEC member countries. The method of this study is a causal relationship with multiple linear regression analysis using the Generalized Method of Moments to estimate the parameter. The results obtained from this analysis are that the starting a business has a considerable role in foreign direct investment in addition to the economic control variables in the form of Real GDP, Labor Force, and Human Development Index. The conclusion of this study is starting a business and the Human Development Index has a very vital role in the development of investment for the Asia Pacific region.*

**Keywords:** *Foreign Direct Investment, Ease of Doing Business, APEC*

#### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai keadaan suatu perekonomian dan

menjadi ukuran untuk menilai keberhasilan suatu pembangunan. Setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menentukan

target pertumbuhan ekonomi negaranya demi keberhasilan perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur sejauh mana perkembangan perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya yang dapat dilihat melalui meningkatnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa meningkatnya kegiatan ekonomi dapat memberikan tambahan pendapatan sehingga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai indikator untuk menilai apakah perekonomian berjalan dengan baik atau tidak dan untuk melihat pendapatan total yang diperoleh dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara tidak terlepas dari peran investasi di dalam suatu negara. Pengaruh EoDB pun tidak terlepas berpengaruh terhadap keputusan investasi di dalam suatu negara.

*Foreign Direct Investment (FDI)* merupakan salah satu indikator perekonomian yang selalu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Semakin banyak jumlah FDI yang masuk ke suatu negara akan berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap kinerja perekonomian negara tersebut. Salah satu hal yang menjadi penting dalam penyediaan modal dalam semua sektor ekonomi yang sangat berguna adalah FDI (Badri & Sheshgelani, 2017). FDI diartikan sebagai investasi jangka panjang yang dilakukan secara langsung oleh investor asing di dalam suatu bidang usaha warga negara domestik. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selain menguatkan sektor-sektor produksi di dalam negeri, kerjasama antar negara-negara tidak kalah penting terutama dalam hal investasi dan ekspor impor. Salah satu bentuk kerjasama antar negara-negara di dunia adalah kerjasama APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). APEC adalah forum kerja sama antar 21 ekonomi di Samudera Pasifik yang berdiri tahun 1989. Indonesia salahsatunya merupakan negara anggota APEC yang ikut berkontribusi dalam menjalankan organisasi tersebut. Dalam keberadaannya, anggota APEC disebut dengan “ekonomi” mengingat setiap anggota saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi dan bukan sebagai negara. APEC memiliki

tujuan utama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerja sama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Pilar kerja sama APEC didasarkan pada tiga pilar yang diantaranya adalah perdagangan dan investasi yang lebih terbuka, fasilitasi perdagangan dan investasi, dan kerjasama ekonomi dan teknis. Hal ini disampaikan pada pertemuan anggota di Bogor, Indonesia yang dinamakan dengan “*Bogor Goals*”. Pilar tersebut membuat iklim ekonomi lebih terbuka dan sangat mendukung untuk meningkatkan investasi antar sesama anggota APEC dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan antar sesama anggota ([www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)). Hal ini didukung dengan potensi investasi dunia yang ada di negara anggota APEC. Dari total seluruh perdagangan, populasi dan investasi, semuanya ada di negara anggota APEC. Hal tersebut memberikan potensi keuntungan bagi setiap anggota APEC dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di dalam negaranya.

Indonesia pada kondisi saat ini berupaya dalam meningkatkan investasi. Hal ini didukung dengan target pemerintah dalam mencapai peringkat EoDB (*Ease of Doing Business*) untuk menduduki peringkat 40 di dunia. Pada tahun 2019, target pemerintah meleset dengan hanya mendapatkan peringkat 72 pada tahun 2019. Peningkatan kemudahan berusaha pada saat ini telah terbukti meningkatkan investasi dalam suatu negara. Penilaian EoDB di Indonesia hanya dilakukan di dua kota, yaitu Jakarta dan Surabaya dengan memiliki bobot yang berbeda. Bobot penilaian Jakarta adalah sebesar 78% dan sisanya sebesar 22% adalah Surabaya. Usaha pemerintah dalam meningkatkan kemudahan berusaha telah terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No.97 Tahun 2014 dengan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam mengurus perizinan apapun, masyarakat dapat mengurus perizinan tersebut dalam satu tempat saja.

*Starting a Business* dalam dunia usaha lebih memfokuskan setiap pengusaha sebelum menjalankan usahanya memiliki tahapan di awal sebelum usahanya berjalan

pada semestinya. Pada umumnya pengusahaan harus mengurus segala dokumen yang menunjukkan suatu keabsahan / legalitas baik itu terkait menjadikan badan hukum maupun saat memulai usaha secara resmi. Sepatutnya pemerintah tidak memberlakukan hambatan masuk untuk pengusaha berupa prosedur birokrasi, biaya transaksi dan waktu layanan yang sangat lama dan lamban bagi pelaku usaha untuk mengurus dokumen legalitas yang diperlukan dalam pembentukan sebuah perizinan. Hal ini selain dikatakan bernilai penting, proses awal ini juga menjadi stimulus dan menentukan yang menjadi dasar pemilik usaha membuat keputusan investasi. Hal itu tersebut akan berlanjut ke tahap operasional perusahaan atau malah sebaliknya, yang dilakukan adalah mempertimbangkan kembali untuk tidak jadi berusaha. Dengan berhasilnya pada fase awal ini mereka akan optimis maju ke tahap selanjutnya dalam berusaha, termasuk memperoleh jaminan perlindungan hukum dan keamanan, mengakses berbagai layanan pemerintah, memperoleh fasilitas dan berhubungan dengan institusi lain seperti kredit perbankan, pengadaan barang atau jasa, dll. Berdasarkan perhitungan EoDB, tahapan awal ini terkait kebutuhan pelaku usaha untuk mengurus legalitas pembentukan badan usaha, administrasi pajak dan jaminan sosial. Indeks kinerja instansi layanan pemerintah maupun para pihak terkait lainnya akan dikalkulasi berdasarkan kejelasan serta keringkasan prosedural, kepastian layanan dan kecepatan layanan, legalitas dan keringanan biaya transaksi, serta ketersediaan pilihan dalam penyeteroran modal minimum.

Berbeda halnya dengan *Dealing with Construction Permits*, secara umum pelaku usaha sampai saat ini masih tetap membutuhkan suatu bangunan dan lokasi tertentu bagi kegiatan usahanya dimanapun berada, termasuk bangunan sebagai gudang untuk penyimpanan barang/produk yang dihasilkan. Pada tahap ini lebih ditegaskan bahwa dalam pendirian bangunan lebih bertujuan untuk memastikan terpenuhinya syarat keselamatan bangunan/gudang yang dibangun, kepastian akan hak milik atas lahan, serta ketepatan akan peruntukan lokasi bangunan yang dibangun untuk memastikan keberadaan bangunan tersebut tidak melanggar tata aturan ruang, keamanan dan

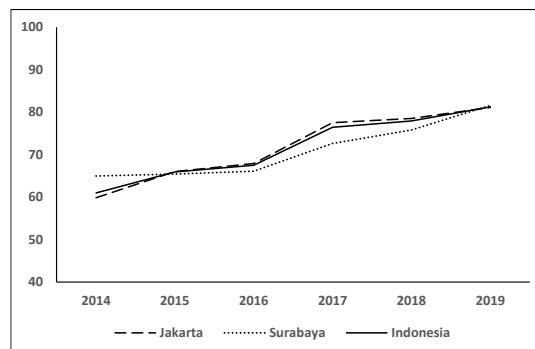
kenyamanan sosial serta lingkungan. Terkait dengan tujuan-tujuan tersebut, proses mendapatkan perizinan dan penetapan pungutan seharusnya berada dalam prinsip yang dapat berjalan secara efisien. Instrumen legal yang dimaksud bertujuan untuk memastikan keselamatan lingkungan dan penghindaran dari gangguan, misalnya jika diberikan dalam suatu jenis izin dan tidak perlu izin berlapis-lapis yang pada substansinya memiliki tujuan serupa (KPPOD, 2016).

PTSP merupakan kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang berwenangan atas perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahapan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Hal ini didukung oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu mengatur ruang lingkup kerja dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta. Selain membentuk PTSP, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Indonesia terus melakukan perbaikan standar operasional prosedur di bidang perizinan dengan mengacu kepada indeks Ease of Doing Business (EoDB). Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang baik serta menggairahkan usaha-usaha baru (termasuk enterpreneur) untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Peningkatan indeks pun diharapkan mampu meningkatkan produk domestik bruto (PDB) yang berpengaruh meningkatkan daya saing nasional. Titik lokus untuk DKI Jakarta dalam hal *starting a business* dan *dealing with construction permits* adalah sebesar 78%, sedangkan sisanya adalah di Surabaya. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta adalah Perangkat Daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta dengan sistem satu pintu di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam menunjang peningkatan investasi asing yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, DKI Jakarta yang

merupakan lokus utama survey EoDB menjadi penentu penilaian dalam kemudahan berusaha. Perizinan dan non perizinan yang merupakan salah satu indikator dalam penentuan kemudahan berusaha di Indonesia menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi. Secara tidak langsung, perizinan dan non perizinan memiliki pengaruh yang cukup vital untuk investor dalam berinvestasi di Indonesia. Kontribusi yang diberikan PTSP dalam meningkatkan kemudahan berusaha tertuang pada dua indikator EoDB, yakni *starting a business* dan *dealing with construction permits*. Indikator *starting a business* dan *dealing with construction permits* merupakan suatu indikator memulai usaha dan perizinan konstruksi di dalam suatu negara dengan penilaian meliputi prosedur, biaya, dan waktu. Hal tersebut merupakan kewenangan PTSP yang perlu untuk ditingkatkan penilaiannya dalam mendukung kemudahan berusaha.

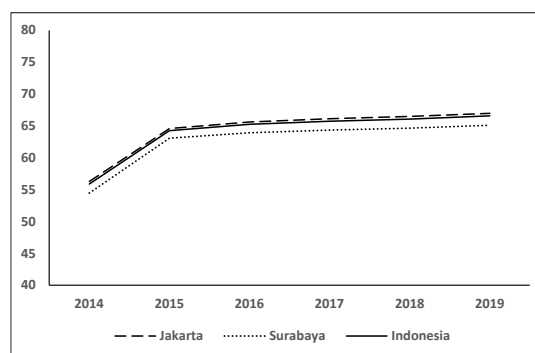
Kaitannya dengan *starting a business* dan *dealing with construction permits*, ada tiga unsur yang paling dapat diukur yaitu prosedur perizinan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perizinan, dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus perizinan tersebut hingga selesai. Dalam hal ini perlu diketahui seberapa besar pengaruh indikator tersebut terhadap investasi di kawasan Asia Pasifik. Ini perlu diketahui untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai indikator yang lebih dominan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Berikut ini ditampilkan grafik mengenai trend *starting a business* dan *dealing with construction permits* Indonesia. Dari Gambar 1 di bawah ini dapat terlihat secara deskriptif trend peningkatan *Starting a Business* untuk Jakarta dan Surabaya meningkat secara positif dalam lima tahun terakhir. Trend meningkat yang ditampilkan dari grafik tersebut menggambarkan perbaikan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal memulai usaha.



Gambar 1. *Starting a Business*

(Sumber : World Bank, diolah Jun 2019)

Sedangkan *dealing with construction permits* memiliki nilai yang cenderung stabil sejak lima tahun terakhir. Hal tersebut dapat terlihat dari Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. *Dealing with Construction Permits*

(Sumber : World Bank, diolah Jun 2019)

Hal ini dirasakan perlu untuk dianalisa pengaruh pengaruh *starting a business* dan *dealing with construction permits* dalam mengontrol peranan pemerintah untuk meningkatkan investasi sebagai penopang pertumbuhan perekonomian. Ranking EoDB yang lebih tinggi dapat menarik FDI lebih banyak dan memberikan beberapa bukti bahwa beberapa indikator penting dalam EoDB berpengaruh terhadap jumlah FDI. Selain itu, Menurut Corcoran dan Gillanders (2012) & Aziz (2018), Regulasi dan lingkungan usaha yang lebih baik sebagaimana yang didefinisikan oleh Ease of Doing Business World Bank terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap jumlah Investasi langsung Asing (Foreign Direct Investment) di suatu perekonomian. Menurut Jovanovic (2017), dalam penelitiannya menganalisis hubungan pengaruh antara kemudahan berusaha terhadap FDI di negara - negara yang dahulunya merupakan negara sosialis. Dari penelitiannya, dijelaskan bahwa semua indikator kemudahan berusaha dari

sisi waktu, biaya, dan prosedur berpengaruh terhadap FDI. Variabel kontrol yang dimasukkan dalam penelitian tersebut adalah gdp, inflasi, pajak dan pendidikan. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa gdp, pajak, dan indikator kemudahan berusaha mempengaruhi investasi yang masuk ke dalam negara yang dahulunya sosialis. Hal ini pun berguna untuk mengetahui peran PTSP sebagai penyedia jasa layanan izin dan non-izin untuk memberikan kontribusi optimal untuk masyarakat pada umumnya.

## METODOLOGI

Investasi dalam teori ekonomi makro dapat dikatakan sebagai pengeluaran pemerintah dalam membeli barang-barang modal dan peralatan produksi untuk mengganti dan lebih terutama untuk menambah barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa mendatang. Investasi pada umumnya untuk negara yang cukup terbuka merupakan suatu komponen dalam pendukung PDB dengan persamaan sebagai berikut :

$$PDB = C + I + G + (X-M)$$

Samuelson (2004) berpendapat bahwa komponen investasi meliputi penambahan stok modal atau barang di dalam suatu negara, seperti bangunan peralatan produksi dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau pembelanjaan yang dapat berupa jenis barang modal, bangunan, peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa atau untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga terjadi peningkatan output yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat.

Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok capital dan selanjutnya menaikkan produktivitas. Di negara yang rasio tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia saat ini, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal.

Arsyad (2010) berpendapat teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dikatakan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di dalam suatu negara. Semakin cepat perkembangan investasi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk, maka semakin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Semakin tinggi rasio kapital per tenaga kerja maka cenderung semakin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan teori Harrod-Domar yang telah mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya dan merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana telah menekankan peranan pertumbuhan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar. Hal itu disampaikan oleh Sadono (2007).

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Salvatore (1997) menjelaskan bahwa PMA meliputi investasi portofolio (portfolio investment), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya. Yang kedua PMA meliputi Foreign Direct Investment (FDI), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik,

pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Wiranata (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang cukup penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka pada umumnya memerlukan investasi asing terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di dalam negara maju, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa Barat) cukup dibutuhkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan menciptakan lapangan kerja. Untuk kasus di negara berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan dikarenakan modal dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Penelitian ini lebih fokus dilakukan untuk mengukur dampak dari *starting a business*, *dealing with construction permits*, dan variabel kontrol lainnya terhadap besaran investasi negara-negara keanggotaan Asia Pacific. Target dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi yang tepat guna dalam meningkatkan besaran investasi di Indonesia, khususnya DKI Jakarta yang memberikan kontribusi 78% terhadap penilaian EoDB secara nasional. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pengaruh variabel *starting a business*, *dealing with construction permits* dan sejumlah variabel kontrol lainnya terhadap besaran investasi. Variabel kontrol yang dipakai dalam penelitian ini meliputi GDPRIIL, *Labor Force*, Inflasi, HDI (*Human Development Index*).

Jovanovic (2017) dalam penelitiannya mengangkat isu indikator EoDB termasuk *Starting a Business* dan *Dealing with Construction Permits* mempengaruhi FDI pada negara anggota eks-sosialis. Pergerakan dari FDI terpengaruh oleh beberapa variabel dalam jangka pendek. Korupsi dalam sistem birokrasi serta kualitas institusi yang buruk meningkatkan biaya dalam melakukan usaha, sehingga hal tersebut dapat menurunkan tingkat aktivitas FDI di dalam suatu negara. Dalam hal ini pengaruh kemudahan berusaha memiliki dampak yang positif terhadap daya

tarik investasi di dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan biaya yang rendah untuk memulai usaha di dalam suatu negara. Pada penelitian ini variabel yang digunakan dalam hal kemudahan berusaha adalah variabel *Starting a Business* dan *Dealing with Construction Permits*. Dalam penjelasan GDP mempengaruhi FDI, dijelaskan dalam penelitian Jovanovic (2017) negara yang lebih besar akan memberikan daya tarik yang lebih besar untuk datangnya FDI. Kaitannya dengan inflasi menurut teori neo-klasik ekonomi, tingginya tingkat inflasi akan berdampak terhadap biaya modal yang lebih tinggi, sehingga hal tersebut dapat berdampak terhadap mengurangi minat investasi di dalam suatu negara. Tingkat tenaga kerja (ketersediaan tenaga kerja) pun pada nyatanya memiliki pengaruh yang positif terhadap daya tarik investasi di dalam suatu negara. Hal ini berkaitan dengan keseimbangan antara suplai demand tenaga kerja yang terjadi di dalam suatu negara. Ketika suplai tenaga kerja yang besar, maka kemungkinan gaji tenaga kerja yang dibayarkan lebih kompetitif (lebih rendah). Hal ini akan mengurangi/mengefisienkan biaya perusahaan untuk biaya tenaga kerja sehingga secara langsung akan berdampak terhadap daya tarik untuk berinvestasi di dalam suatu negara. Menurut Todaro (2013) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan berdampak untuk menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Setiap kegiatan produksi yang akan dilaksanakan pasti akan memerlukan tenaga kerja. Tenaga kerja bukan hanya berarti buruh yang terdapat dalam suatu perekonomian. Arti tenaga kerja meliputi juga keahlian dan keterampilan yang mereka miliki (skill sumber daya manusia). Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan kuantitas yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan seberapa banyak suatu lapangan usaha akan mempekerjakan tenaga kerja

dengan berbagai tingkat upah dalam suatu periode tertentu. Pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap permintaan barang yang diproduksinya. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam waktu tertentu. Dalam teori klasik sumber daya manusia, tenaga kerja merupakan individu yang bebas memilih untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas memilih dan menentukan jumlah jam kerja yang diinginkan.

Berbeda halnya dengan inflasi yang dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus (Rahardja & Manurung, 2004). Dari definisi ini ada tiga syarat untuk dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Pertama, adanya kenaikan harga. Kedua, kenaikan tersebut terjadi terhadap harga-harga barang secara umum. Ketiga, kenaikan tersebut berlangsung cukup lama. Dengan demikian kenaikan harga yang terjadi pada hanya satu jenis barang, atau kenaikan yang terjadi hanya sementara waktu tidak dapat disebut dengan inflasi. Pandangan kaum moneteris menganggap inflasi sebagai akibat dari jumlah uang yang beredar yang terlalu banyak, sehingga daya beli uang tersebut (*purchasing power of money*) menurun (Mangkoesoebroto & Algifari, 1998). Sebagai akibatnya harga barang-barang menjadi naik. Sedangkan menurut kaum strukturalis, inflasi merupakan gejala ekonomi yang disebabkan oleh masalah struktural seperti masalah gagal panen yang menyebabkan kekurangan persediaan barang, sehingga tidak dapat memenuhi jumlah permintaan secara keseluruhan. Sebagai akibat harga barang tersebut mengalami kenaikan.

Ada beberapa macam jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Diantaranya Pertama, *Demand Pull Inflation*, dimana inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Akibatnya sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan banyak sementara penawaran tetap, harga akan naik. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya

diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru. Kedua, *Cost Push Inflation*, dimana inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Akibat naiknya biaya faktor produksi, dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen, yaitu langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produknya naik karena penurunan jumlah produksi. Ketiga, *Bottle Neck Inflation*, dimana inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran (*supply*) atau faktor permintaan (*demand*). Jika dikarenakan faktor penawaran maka persoalannya adalah sekalipun kapasitas yang ada sudah terpakai tetapi permintaannya masih banyak sehingga menimbulkan inflasi. Adapun inflasi karena faktor permintaan disebabkan adanya likuiditas yang lebih banyak, baik itu berasal dari sisi keuangan (*monetary*) atau akibat tingginya ekspektasi terhadap permintaan baru.

Ada beberapa dampak inflasi terhadap suatu perekonomian di dalam suatu negara. Diantaranya nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin rendah. Penurunan daya beli mata uang selanjutnya akan berdampak pada individu, dunia usaha dan APBN. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan. Di samping itu inflasi mendorong redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat, hal inilah yang disebut dengan efek redistribusi dari inflasi. Inflasi akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akibat inflasi akan mengakibatkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil yang lain akan jatuh. Umumnya bagi mereka yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri akan mengalami dampak negatif inflasi, hal tersebut dikarenakan inflasi yang tinggi pendapatan riil mereka akan turun. Dampak lain dari inflasi menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja. Hal tersebut terjadi dikarenakan inflasi memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini. Inflasi menyebabkan sebuah lingkungan yang tidak stabil bagi kondisi ekonomi. Jika konsumen memperkirakan

tingkat inflasi di masa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-besaran pada saat sekarang dari pada mereka menunggu tingkat harga sudah meningkat lagi. Hal lainnya adalah inflasi cenderung memperpendah tingkat bunga riil dan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pasar modal. Hal tersebut menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun, dan sebagai akibatnya, investor sektor swasta berkurang sampai ke bawah tingkat keseimbangannya.

Data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari World Bank dan UNDP untuk negara keanggotaan APEC. Data yang diolah dalam analisis ini adalah data panel yang terdiri dari dua puluh negara yang disusun dari tahun 2010 – 2017. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda dengan metode penaksiran parameter GMM (*Generalized Method Moment*). Analisis regresi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pengaruh sejumlah variabel bebas terhadap variabel tak bebas (Gujarati & Porter, 2009).

Analisis regresi merupakan suatu model matematis yang dapat digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara dua atau lebih variabel. Istilah regresi yang berarti ramalan atau taksiran pertama kali diperkenalkan Sir Francis Galton pada tahun 1877, sehubungan dengan penelitiannya terhadap tinggi manusia, yaitu antara tinggi anak dan tinggi orang tuanya. Dalam penelitiannya, Galton menemukan bahwa tinggi anak dan tinggi orang tuanya cenderung meningkat atau menurun dari berat rata-rata populasi. Garis yang menunjukkan hubungan tersebut disebut garis regresi. Analisis regresi lebih akurat dalam melakukan analisis korelasi, karena pada analisis itu kesulitan dalam menunjukkan slop (tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan). Jadi dengan analisis regresi, peramalan atau perkiraan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula. Karena merupakan suatu prediksi, maka nilai prediksi tidak selalu tepat dengan nilai riilnya, semakin kecil tingkat penyimpangan antara nilai prediksi dengan nilai riilnya, maka semakin tepat persamaan regresi yang dibentuk. Dapat disimpulkan bahwa analisis

regresi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan kemungkinan bentuk hubungan antara variabel-variabel, dengan tujuan pokok dalam penggunaan metode ini adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel lain yang diketahui. Persamaan Regresi (*regression equation*) adalah suatu persamaan matematis yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Persamaan regresi yang digunakan untuk membuat taksiran mengenai variabel dependen disebut persamaan regresi estimasi, yaitu suatu formula matematis yang menunjukkan hubungan keterkaitan antara satu atau beberapa variabel yang nilainya sudah diketahui dengan satu variabel yang nilainya belum diketahui. Sifat hubungan antar variabel dalam persamaan regresi merupakan hubungan sebab akibat (*causal relationship*). Oleh karena itu, sebelum menggunakan persamaan regresi dalam menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel, maka perlu diyakini terlebih dahulu bahwa secara teoritis atau perkiraan sebelumnya, dua atau lebih variabel tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Variabel yang nilainya akan mempengaruhi nilai variabel lain disebut dengan variabel bebas (*independent variable*), sedangkan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh nilai variabel lain disebut variabel terikat (*dependent variable*). Disamping hubungan linier dua variabel, hubungan linier lebih dari dua variabel dapat juga terjadi. Pada hubungan ini, perubahan satu variabel dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel lain. Maka regresi linier berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara peubah respon (*variable dependent*) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu predaktor (*variable independent*) (Gujarati, 2009). Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan memuat prediksi/perkiraan nilai Y atas nilai X. Bentuk umum persamaan regresi linier berganda yang mencakup dua atau lebih variabel, yaitu :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + \epsilon_i$$

dalam persamaan tersebut lebih menunjukkan bahwa secara statistik terdapat pengaruh linier dari sejumlah variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Hal tersebut akan diuji



secara statistik dengan uji parsial parameter dan uji simultan model yang dibentuk dari data sampel. Berikut ini adalah model ekonomi yang dibentuk dari variabel bebas dan variabel tidak bebas untuk penelitian ini :

$$FDI_{ij} = b_0 + b_1SB_{ij} + b_2DCP_{ij} + b_3GDP_{ij} + b_4LF_{ij} + b_5INF_{ij} + b_6HDI_{ij} + e_{ij}$$

Keterangan :

- FDI = *Foreign Direct Investment Riil*
- SB = *Starting a Business*
- DCP = *Dealing with Construction Permits*
- GDP = *GDP Riil*
- LF = *Labor Force*
- INF = *Inflasi*
- HDI = *Human Development Index*
- i* = negara ke – *i*
- j* = tahun ke – *j*

Model tersebut mengkombinasikan variabel utama yang menjadi fokus penelitian dan variabel kontrol berupa variabel ekonomi lainnya yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan FDI. Dari model tersebut akan dicarikan persamaannya dengan metode statistic inferensi. Masing-masing dari parameter beta akan diuji secara serentak dan secara parsial. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel secara independent terhadap peningkatan FDI negara anggota APEC.

Mengikuti Jayasurya (2011) yang menggunakan data panel dan mengestimasi parameter model dengan pendekatan GMM. Metode ini cukup baik untuk menanggulangi kebiasaan model akibat pelanggaran homoskedastisitas dan terjadinya korelasi yang tinggi antar cross section di dalam data. Terkait dengan penelitian data ekonomi, metode GMM ini lebih efisien. Pada penerapannya, penggunaan metode OLS kurang baik karena sulit untuk memenuhi asumsi homoskedastisitas dan autokorelasi dalam model sehingga dapat digunakan metode penaksiran menggunakan GMM. Selain itu, analisis deskriptif akan digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan keyakinan dalam memberi saran dan rekomendasi penelitian. Analisa deskriptif digunakan dalam mendukung analisis kualitatif dalam penelitian. Kesimpulan pengaruh disimpulkan oleh model ekonomi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

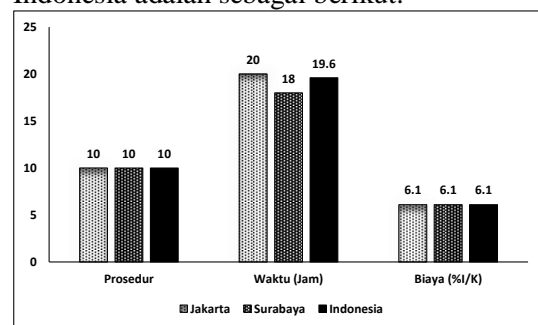
Hasil analisis hubungan pengaruh *starting a business, dealing with construction permits*, dan variabel kontrol lainnya dengan analisis regresi berganda menggunakan metode GMM adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Output Penelitian Pengaruh Investasi

Indikator	Koefisien	Std Error	z value
<i>Starting a business</i>	468.33	165.56	2.83***
<i>Dealing with construction permits</i>	-152.62	224.17	-0.68
GDP Riil	0.01	0.00	6.37***
Labor Force	0.00	0.00	2.44**
Inflasi	2549.50	1559.40	1.63
HDI	106830	33531	3.19***
c	-111988	32038	-3.50
Wald Chi <sup>2</sup>			278.43
Prob > Chi <sup>2</sup>			0.0000
R-Squared			0.7702

Ket : signifikansi \*\*\* pada  $\alpha = 1\%$  dan \*\* pada  $\alpha = 5\%$

Analisis pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang berpengaruh terhadap besar investasi yang masuk terhadap negara anggota APEC diantaranya adalah *starting a business* dengan  $\alpha=5\%$ , GDP Riil dengan  $\alpha=5\%$ , Labor Force dengan  $\alpha= 1\%$ , dan HDI dengan  $\alpha=5\%$ . Dari Analisa deskriptif *starting a business* secara lebih spesifik untuk Jakarta, Surabaya, dan Indonesia adalah sebagai berikut.



Gambar 3. Starting a Business Indikator  
(Sumber : World Bank, diolah Jun 2019)

Dalam hal prosedur, baik Jakarta maupun Surabaya memiliki jumlah prosedur yang sama yaitu 10 kali dan biaya yang sama yaitu 6.1% pendapatan per kapita menurut penilaian world bank. Walau demikian, unsur waktu untuk Surabaya lebih cepat dua hari dibandingkan dengan Jakarta. Model ekonomi yang didapatkan memiliki nilai *R-Squared* sebesar 0,7702 yang artinya bahwa dengan menggunakan variabel tersebut untuk mengetahui pengaruhnya terhadap investasi, model dapat menggambarkan hubungan pengaruh sebesar 77,02% dengan variabel-variabel yang digunakan. Selain dari itu sebesar 22,98% ditentukan oleh variabel lain. Asumsi dari model tersebut adalah *ceteris paribus* dengan mengandaikan variabel lain di luar variabel tersebut bersifat konstan/tidak berubah.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran *starting a business* terhadap besaran investasi untuk negara anggota APEC sungguh sangat berdampak. Dibandingkan dengan variabel kontrol lainnya, *starting a business* memiliki pengaruh yang cukup besar setelah HDI (Human Development Index). Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah prosedur dan syarat memulai usaha negara anggota APEC memberikan pengaruh positif terhadap masuknya investasi. Selain dari hal tersebut, HDI yang merupakan indikator kualitas sumber daya manusia di dalam suatu negara memberikan dampak yang baik terhadap masuknya investasi di dalam suatu negara. Investasi di kawasan Asia Pacific akan lebih tertarik masuk ke dalam negara dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan softskill & hardskill yang baik.

## SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari penelitian ini adalah *starting a business* dan *Human Development Index* memiliki pengaruh yang besar untuk menjadi daya tarik investasi masuk di negara kawasan Asia Pacific. Untuk meningkatkan besaran investasi di dalam suatu negara kawasan Asia Pasifik, perlu untuk memfokuskan suatu negara dalam terus memperbaharui kualitas perizinan dan non-perizinan khususnya hal dalam memulai usaha dan terus meningkatkan daya saing sumber daya manusia untuk menjadi daya tarik investasi.

Untuk meningkatkan investasi di Indonesia, perlu untuk terus memperbaiki secara berkesinambungan dalam hal perizinan dan non-perizinan untuk memulai usaha. Dalam hal sumber daya manusia, perlu untuk Indonesia dapat terus melakukan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi profesi. Dengan sumberdaya terdidik, maka efisiensi dalam hal berusaha akan semakin meningkat yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi. Hal tersebut secara empiris memberikan daya saing untuk menarik investasi masuk di dalam suatu negara kawasan Asia Pasifik.

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan perputaran ekonomi terbesar di Indonesia, melalui DPMPTSP, DKI Jakarta memiliki tantangan untuk selalu terus memperbaiki kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dalam hal prosedur, waktu, dan biaya secara berkesinambungan sehingga berdampak meningkatkan nilai investasi yang masuk. Dalam hal kualitas sumber daya manusia, DKI Jakarta khususnya merupakan provinsi dengan pusat pemerintahan sekaligus perekonomian di Indonesia. Dimana para sumber daya manusia terampil cukup tertarik masuk dan bersaing di DKI Jakarta. Hal ini menjadikan DKI Jakarta yang menjadi ikon Indonesia yang menjadikan DKI Jakarta semakin kompetitif dibandingkan provinsi lainnya, terlebih untuk Asia Pasifik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada Kepala DPMPTSP, Kepala Bidang Pengembangan, dan seluruh rekan Bidang Pengembangan khususnya Seksi Peningkatan Kualitas Pelayanan yang telah memberi kesempatan untuk melaksanakan kajian dan memfasilitasi publikasi karya tulis ilmiah ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, Guritno Mangkoesobroto. 1998. Teori Ekonomi Makro. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Arash Ketabforoush Badri & Aidin Poorabdollahi Sheshgelani, 2017. Economic Freedom and FDI in Selected Developing Countries. Noble International Journal of Economics and

- Financial Research, Noble Academic Publsiher, vol. 2(5).
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta.
- Corcoran, Adrian and Gillanders, Robert. 2012. *Foreign Direct Investment and The Ease of Doing Business*. UCD Centre for Economic Research Working Paper Series; WP12/19, University College Dublin. School of Economics.
- Dominick, Salvatore. 1997. *Ekonomi Internasional*, alih bahasa oleh Haris Munandar edisi 5 cetak 1. Erlangga, Jakarta
- Gujarati, D.N. & Porter, D.C., (2009). *Basic Econometrics*. 5th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin
- Guritno Mangkoesobroto, dan Algifari, *Teori Ekonomi Makro edisi III*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1998)
- Herlan Firmansyah, dkk., *Advanced Learning Economics 2 for Grade XI Social Sciences Programme*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2014)
- Jayasuriya, D. (2011). *Improvements in the World Bank's Ease of Doing Business Rankings: Do They Translate into Greater Foreign Direct Investment Inflows?*. World Bank Policy Research Working Paper No. 5787
- Jovanovic and Biljana. 2017. *Ease of doing business and FDI in the ex-socialist countries*. *Int Econ Econ Policy* 15:587-627, Springer
- KPPOD. 2016. *Reformasi Kemudahan Berusaha : Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah*. Desember 2016.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Prathama Rahardja, dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*, edisi II, (Jakarta: FE UI, 2004)
- Omar Ghazy Aziz (2018). *Institutional quality and FDI inflows in Arab economies*. *Finance Research Letters. Journal of Political Economy*: 29: 2013
- Sukirno, Sadono. 2007. *Makro ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, William D, 2004, *Ilmi Makro Ekonomi*. Jakarta PT. Media Edukasi.
- Todaro, Michael P, 2013. *edisi kesebelas. Pembangunan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Wiranata, S. 2004. *Pengembangan Investasi di Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, XII (1) 2004
- [https://kemlu.go.id/portal/id/read/164/halaman\\_list\\_lainnya/asia-pacific-economic-cooperation-apec](https://kemlu.go.id/portal/id/read/164/halaman_list_lainnya/asia-pacific-economic-cooperation-apec)
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180125174422-4-2526/jokowi-dan-obsesinya-pada-ease-of-doing-business>
- <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1142534-anindya-bakrie-separuh-potensi-investasi-dunia-ada-di-negara-apec>